

LKPj

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

TAHUN ANGGARAN

2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

3.1.3.10. Kesatuan Bangsa

Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.143.796.555.407 dengan realisasi keuangan Rp. 142.310.014.098 (98,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Urusan tersebut dilaksanakan melalui 6 Program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76,80	81,13	105,64
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	96%	92%	95,83
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus	0 kasus	200
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
4.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	77,35	76,27	98,60
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				

2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat dengan capaian kinerja 200%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan outcome meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di Sumatera Barat. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan output kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 243 orang. Dalam sub kegiatan ini telah terlaksana beberapa kegiatan diantaranya terlaksananya 1 kali bimtek peningkatan kapasitas intelijen Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, 1 kali bimtek kewaspadaan dini masyarakat dan 2 kali rakor kewaspadaan nasional dan penanganan konflik kabupaten/kota.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah sebanyak 107 orang. Dalam sub kegiatan ini telah terlaksana beberapa kegiatan diantaranya :

- Terlaksananya 6 kali rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM bertujuan untuk menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta memberikan laporan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.
 - Terlaksananya 1 kali rapat Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial (Timdu PKS). Tim ini berfungsi untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial. Rapat Timdu PKS dilaksanakan guna meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat, terutama eskalasi potensi konflik terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
 - Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing (POA). Tim Pemantauan Orang Asing bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi gubernur dalam mengambil langkah/kebijakan. Kegiatan rakor tim Pemantauan Orang Asing dilaksanakan untuk menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul dari keberadaan orang asing di Sumatera Barat.
 - Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun sinergitas antara Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyikapi isu-isu strategis di daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,

serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 4 laporan. Pada sub kegiatan ini telah terlaksana beberapa kegiatan :

- Terlaksananya 3 kali rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim ini bertugas mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah provinsi.
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan permasalahan strategis maupun potensi konflik yang berkembang di tengah masyarakat sehingga terhimpun informasi terkait potensi ATHG, keberadaan orang asing, NGO/lembaga asing maupun data data potensi konflik yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagai acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi sebanyak 16 dokumen. Pada kegiatan ini terlaksana 1 kali FGD yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait. Kegiatan ini menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas keamanan di Sumatera Barat.
- b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan outcome meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. Program tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 790 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 1 kali bimbingan teknis wawasan kebangsaan, 1 kali penguatan pembauran kebangsaan, 1 kali pelatihan peningkatan pemahaman bela negara, 1 kali pelatihan Peningkatan kesadaran Bela Negara, 1 kali peningkatan pemahaman forum pembauran kebangsaan, 1 kali pelatihan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, 1 kali outbond peningkatan pemahaman bela negara dan 1 kali MUSDA IKAL Lemhanas.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, sebanyak 390 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali penguatan pembauran kebangsaan, 1 kali rakor pemantapan bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa, 1 kali rapat Hari Bela Negara dan 1 kali rapat peringatan Situjuah.
- Pembentukan Paskibraka, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paskibraka sebanyak 57 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana seleksi paskibraka di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dan pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat.

c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan outcome terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 476 orang. Pada sub kegiatan ini, terlaksana 21 kali Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi pelajar dan generasi muda dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 210 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan 4 kali rapat-rapat tim Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertujuan menampung informasi terkait permasalahan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 1 laporan. Pada sub kegiatan ini telah terlaksana kegiatan

monitoring perkembangan kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat sehingga terhimpun informasi terkait permasalahan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, sebagai acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I. Untuk mencapai target kinerja sasaran I yaitu konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- b. Sasaran II : Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan capaian kinerja 98,60%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan outcome terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 3840 orang. Pada sub kegiatan ini telah terlaksana 29 kali pendidikan politik bagi tokoh masyarakat di Sumatera Barat, 1 kali bimbingan teknis pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, 1 kali rapat koordinasi peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), fasilitasi terhadap proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, fasilitasi terhadap pencairan bantuan keuangan bagi 9 partai politik, fasilitasi penyaluran bantuan Hibah KPU, Bawaslu, Polda, Korem terkait Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan 1 kali Suvey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sebanyak 300 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 dengan tujuan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di Sumatera Barat.

b) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan outcome terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 119 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana 2 kali sosialisasi dan pembinaan ormas di daerah dengan tujuan agar aktivitas yang dilakukan oleh ormas di daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 14 orang. Pada sub kegiatan ini terlaksana koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait keberadaan dan aktivitas ormas yang ada di daerah.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat khususnya indikator yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Membentuk Pokja IDI yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-934-2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pokja ini beranggotakan Kanwil Hukum dan HAM Prov Sumbar, Kementerian Agama Prov Sumbar, BPN Prov Sumbar, BIN Sumbar, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Badan Pusat Statistik, Polda Sumbar, KPU Prov. Sumbar, Bawaslu Prov. Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, MUI, Universitas Andalas dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tugasnya adalah memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Melaksanakan pendidikan politik bagi 3840 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, ninik mamak, bundo kanduang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se- Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam politik sehingga dapat mengungkit salah satu indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan politik di Sumatera Barat dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah Nomor 200-147-2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Tim ini beranggotakan Kapolda, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud, KPU Provinsi, BIN Daerah Sumbar, Bawaslu Provinsi Sumbar dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

- c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian kinerja 105,64%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen yang terdiri dari dokumen Renja Perangkat Daerah (Rancangan Awal, Rancangan Akhir), Renja Perubahan Perangkat Daerah (Rancangan Awal, Rancangan Akhir), RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 laporan diantaranya dokumen Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, Laporan Akhir Tahun, Laporan Evaluasi Renja per triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 16 Laporan diantaranya laporan fisik dan keuangan sebanyak 12 laporan, SPIP, RB, IKM dan SPAN Lapor.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 40 orang ASN di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 18 laporan yaitu LRA per bulan, laporan neraca, laporan semesteran, laporan tahunan, dll.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III. Untuk mencapai target kinerja sasaran III (nilai akuntabilitas kinerja OPD), terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
 2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
 3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
 4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikatornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
 5. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.
- d. Sasaran IV : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian kinerja 95,83%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan :

b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 6 dokumen.
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD sebanyak 12 laporan.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 12 laporan.

(2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 2 Paket.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang pendidikan dan pelatihan sebanyak 40 orang.

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 9 paket diantaranya baterai, kabel raund, lampu listik, isolasi, mcb, stacker, stop kontak, vitting, dll.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 Paket yaitu pengadaan CCTV.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 7 Paket yaitu karangan bunga, bendera rondas merah putih, bendera pagar merah putih, kayu tiang, bendera merah putih, peralatan studio dan alat studio lainnya.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 8 paket diantaranya ATK, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan computer, souvenir/cendera mata, alat kebersihan dan makan minum rapat.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 6 paket diantaranya backdrop, banner informasi, spanduk, baliho, cetak amplop, cetak map, dan penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 5 dokumen.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen.
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, output kegiatan ini adalah jumlah mebel dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel, dengan output kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 55 unit

yang terdiri dari 50 unit kursi rapat, dan 5 unit lemari kayu.

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 10 unit yang terdiri dari 3 unit laptop, 2 unit PC dan 5 unit printer.
- (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan sebanyak 1 laporan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan.
- (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 8 unit.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 38 unit yang terdiri dari 14 unit pemeliharaan AC, 12 unit pemeliharaan notebook/laptop dan 12 unit pemeliharaan printer.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit rehab kamar mandi dan ruang rapat.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya penerbitan surat keterangan keberdaaan ormas, bantuan keuangan partai politik, pemberian hibah uang dan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, pembentukan paskibraka dan pelayanan lainnya bagi masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk lebih mencapai target kinerja sasaran IV (tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi) diantaranya :

1. Penyediaan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan pemeberian layanan kepada masyarakat.
4. Mencitpakan layanan berbasis IT untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100%	12,196,579,423	11,669,811,415	95.68
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100%	149,995,900	139,247,604	92.83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen (Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	8 dokumen (Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	100	87,145,300	86,830,650	99.64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen (Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil	8 dokumen (Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100	15,780,800	13,595,650	86.15

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD)	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD)				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan (Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat daerah)	16 laporan (Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat daerah)	100	47,069,800	38,821,304	82.48
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	100	6,076,933,413	5,683,065,966	93.52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang / Bulan (Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN)	40 orang / Bulan (Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN)	100	5,733,897,513	5,344,005,966	93,2
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen (Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	12 Dokumen (Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	100	321,108,500	317,295,500	98.81
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan (Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	18 laporan (Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	100	21,927,400	21,764,500	99.26
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	100	48,269,575	47,665,453	98.75
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen (Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)	6 Dokumen (Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD)	100	34,000,000	33,561,503	98.71
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan (Jumlah laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	12 Laporan (Jumlah laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	100	7,769,775	7,656,700	98.54

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD)	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD)				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan (Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD)	12 Laporan (Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD)	100	6,499,800	6,447,250	99.19
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	70% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	100	218,676,000	216,424,950	98.97
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket (Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan)	2 Paket (Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan)	100	83,250,000	82,804,150	99.46
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang (Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan)	40 Orang (Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan)	100	135,426,000	133,620,800	98.67
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	100	4,344,316,183	4,250,703,919	97.85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 paket (Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan)	9 paket (Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan)	100	9,248,000	9,248,000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket (Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	1 Paket (Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	100	7,200,000	7,000,000	97.22
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan)	7 Paket (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan)	100	84,145,273	81,800,000	97.21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan)	8 Paket (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan)	100	52,732,875	42,875,300	81.31

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket (Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan)	6 Paket (Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan)	100	42,440,000	32,223,000	75.93
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Dokumen (Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan)	5 Dokumen (Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan)	100	19,860,000	19,860,000	100
	Fasilitas Kunjung Tamu	1 laporan (Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu)	1 laporan (Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu)	100	15,600,000	4,783,000	30.66
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan (Jumlah laporan penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	12 Laporan (Jumlah laporan penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	100	4,037,660,635	3,977,750,119	98.52
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen (Jumlah Dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	1 Dokumen (Jumlah Dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	100	10,429,400	10,164,500	97.46
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen (Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD)	1 Dokumen (Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD)	100	65,000,000	65,000,000	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	100	179,647,518	175,900,000	97.91
	Pengadaan Mebel	55 paket (Jumlah Paket Mebel yang Disediakan)	55 paket (Jumlah Paket Mebel yang Disediakan)	100	62,654,000	59,000,000	94.17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan)	10 Unit (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan)	100	116,993,518	116,900,000	99.92
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi)	12 bulan (Tertib Administrasi)	100	619,491,934	602,355,422	97.23

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Jasa ketahananPe nunjang Urusan Pemerintah Daerah)				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat)	1 Laporan (Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat)	100	5,000,000	4,967,200	99.34
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan (Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan)	1 laporan (Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan)	100	103,150,000	90,595,090	87.83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan)	1 Laporan (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan)	100	511,341,934	506,793,132	99.11
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Terpelihara-nya Barang Milik Daerah)	12 bulan (Terpeliharaan ya Barang Milik Daerah)	100	559,248,900	554,448,101	99.14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak da Perizinannya)	8 Unit (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak da Perizinannya)	100	139,300,000	137,675,503	98.83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Unit (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)	38 Unit (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)	100	25,580,000	25,576,100	99.98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit (Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi)	1 Unit (Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi)	100	394,368,900	391,196,498	99.2
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.73 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	2.73 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	100	2,649,703,900	2,500,249,936	94.36

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan)	1 rekomendasi (Jumlah Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan)	100	2,649,703,900	2,500,249,936	94.36
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan , Bela Negara,Karakter Bangsa, Pemaburan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	790 orang (Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	790 orang (Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	100	1,037,668,900	994,427,975	95.83
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan , Bela Negara,Karakter Bangsa, Pemaburan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	390 orang (Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	390 orang (Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan)	100	283,855,000	264,499,005	93.18
	Pembentukan Paskibraka	57 Orang (Jumlah Paskibraka)	57 Orang (Jumlah Paskibraka)	100	1,328,180,000	1,241,322,956	93.46
III	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengemba-ngan Etika Serta Budaya Politik	3,29 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	3,29 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	100	123,963,810,584	123,817,838,199	99.88
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait	100	123,963,810,584	123,817,838,199	99.88

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)	pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3840 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	3840 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	100	123,607,441,584	123,508,197,747	99.92
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	300 orang (Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	100	235,635,100	194,878,161	82.7

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)	Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah)				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik di Daerah	1 laporan (Jumlah laporan hasilMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik di Daerah)	1 laporan (Jumlah laporan hasilMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik di Daerah)	100	120,733,900	114,762,291	95.05
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN	100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100	220,084,000	184,706,238	83.93
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)	100	220,084,000	184,706,238	83.93
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	119 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	119 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	100	140,084,000	115,415,338	82.39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)				
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	14 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah)	100	80,000,000	69,290,900	86.61
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	3.11 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	3.11 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	100	2,742,006,500	2,643,903,183	96.42
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	1rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100	2,742,006,500	2,643,903,183	96.42
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	476 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	476 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	100	2,359,853,000	2,292,906,450	97.16
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan	210 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di	210 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di	100	327,459,500	303,598,810	92.71

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	1 laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	100	54,694,000	47,397,923	86.66
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.03 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	3.03 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	100	2,024,371,000	1,493,505,127	73.78
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100	2,024,371,000	1,493,505,127	73.78
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	243 Orang (Jumlah orang ang mnegikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	243 Orang (Jumlah orang ang mnegikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	100	591,036,300	225,147,553	38.09

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	107 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	107 orang (Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah)	100	284,986,500	270,976,432	95.08
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	4 Laporan (Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta	100	231,468,200	223,888,471	96.73

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penanganan Konflik di Daerah)	Penanganan Konflik di Daerah)				
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	19 dokumen (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi)	19 dokumen (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi)	100	916,880,000	773,492,671	84.36
	Total			100	143.796.55.407	142.310.014.098	98,97

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Masih rendahnya upaya deteksi dini dan cegah dini masyarakat terhadap potensi ATHG dan potensi kerawanan lainnya	Memaksimalkan fungsi tim dan forum strategis di daerah sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.	-
II	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada yang akan datang	
III	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Adanya dualisme kepengurusan ormas 2. Masih adanya ormas yang tidak memperpanjang laporan keberadaan/aktivitasnya	1. Koordinasi intensif dengan ormas terkait dalam penyelesaian dualisme kepengurusan 2. Menyurati ormas-ormas yang tidak memperpanjang laporan keberadaan /aktivasnya	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat	Pelaksanaan Sosialisasi P4GN khususnya bagi pelajar dan generasi muda secara berkesinambungan, pembentukan tim terpadu P4GN dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang melibatkan instansi terkait	
V	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yg terkandung dalam pancasila sehingga sulit mengimplementasikan nilai2 tersebut dalam kehidupan sehari-hari	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat.	


 Plt. Kepala Badan Kesbangpol
 Provinsi Sumatera Barat
 Adi Dharma, S.Sos
 Pembina TK.I / IV.b
 Nip. 19681016 198903 1 003